

BAB IV

KONSIDERAN-KONSIDERAN PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP IRAN

Di bab II telah dijabarkan tentang hubungan baik yang terjalin antara Arab Saudi dengan Iran. Hubungan yang berawal dari kerjasama diplomatik kemudian merambat ke bidang ekonomi serta keamanan. Walaupun Arab Saudi dan Iran memiliki banyak perbedaan pandangan dalam berbagai masalah, namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin kerja sama. Kemudian di Bab III dijelaskan, bahwa hubungan Arab Saudi dan Iran memburuk. Terjadi eskalasi konflik di antara kedua negara yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran ditahun 2016.

Maka dari bab itu, dalam bab ini nantinya akan dijabarkan tentang alasan yang mendasari Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran walaupun hubungan baik antara kedua negara telah terjalin lebih dari setengah abad. Dalam *decision making theory* William D. Coplin, menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga konsideran, yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dengan mengamati ketiga konsideran ini, nantinya dapat menjelaskan alasan politik luar negeri sebuah negara ditetapkan. Maka dari itu maka pembahasan akan dibagi menjadi 3 sub bab.

A. Politik Dalam Negeri Arab Saudi

Sebelum menjelaskan politik domestik Arab Saudi, maka lebih baik membahas terlebih dahulu tentang bagian mana dari politik dalam negeri yang akan dibahas. Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencers* bagi yang mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Maka dari itu, dalam membahas politik dalam negeri Arab Saudi akan memfokuskan dalam membahas *policy influencers* nya.

Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan sistem monarki. Seperti yang tertera pada pasal 5/A Undang-Undang Dasar Pemerintahan : *“The system of government in the Kingdom of Saudi Arabia is that of a monarchy.”* Sistem monarki yang diterapkan di Arab Saudi bukanlah monarki absolut dimana penguasa diberikan kewenangan dan kekuasaan yang tidak terbatas (Řichova 2011). Sistem monarki Arab Saudi juga bukan termasuk monarki absolut karena kewenangan penguasa tidak dibatasi oleh konstitusi (Alsultan 2013).

Sistem monarki yang diterapkan di Arab Saudi merupakan sistem monarki dinasti. Monarki dinasti merupakan istilah yang diperkenalkan oleh

Herb dalam bukunya yang terkenal *All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies* (1999). Herb mengatakan :

Members of the ruling families monopolize the highest state offices, including the premiership and the portfolios of Interior, Foreign Affairs, and Defense, the ministries known in the Gulf as the wizarat al-siyada, or ministries of sovereignty. The ruling families also distribute members throughout lower positions in the state apparatus, especially in the key ministries. (Herb 1999, 1-8)

Dari pernyataan Herb diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan Raja Arab Saudi tidaklah mutlak. Keluarga kerajaan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan yang diberikan Raja baik di dalam negeri maupun keluar (Alsultan 2013).

Raja Arab Saudi saat ini adalah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang menduduki tahta kerajaan sejak 2015. Putra mahkota Arab Saudi saat ini adalah Pangeran Muhammad bin Nayeh dan wakil Putra Mahkota adalah Pangeran Muhammad bin Salman. Penasihat Raja Salman (setingkat menteri): Pangeran Turki bin Muhammad bin Saud al-Kabir as-Saud. Penasihat Istana, yaitu: Pangeran Khalid bin Saud bin Khalid as-Saud, Pangeran Bandar bin Saud bin Muhammad as-Saud, Pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan bin Abdul Aziz as-Saud, Pangeran Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Saud, Ali bin Ibrahim an-Naimi, Saad bin Nasir asy-Syathri, Rafat bin Abdullah as-Sabbagh (Assegaf 2016). Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa keluarga kerajaan memiliki pengaruh yang besar terhadap Raja dalam pengambilan kebijakannya.

Tabel 4.1
Silsilah Kerajaan Arab Saudi

	Raja Saud (1953-1964)	
	Raja Faisal (1964-1975)	Pangeran Khaled
		Pangeran Saud
	Raja Khaled (1975-1982)	
	Raja Fahd (1982-2005)	
	Raja Abdullah (2005-2015)	Pangeran Miteb
		Pangeran Turki
Raja Abdulaziz bin Saud	Pangeran Sultan	Pangeran Bandar
	Pangeran Nayef	Pangeran Saud
		Pangeran Muhammed (Putra Mahkota)
	Raja Salman (2015-)	Pangeran Sultan
		Pangeran Muhammed (Wakil Putra Mahkota)
	Pangeran Muqrin	
	Pangeran Ahmed	

Keluarga kerajaan Arab Saudi merupakan merupakan aktor yang memilih kandidat yang memenuhi syarat sebagai raja. Keluarga kerajaan juga memiliki kekuatan untuk mengganti raja, jika Raja tersebut membahayakan

martabat atau masa depan dinasti atau jika ia bertindak berlebihan yang mungkin membahayakan negara (Alsultan 2013, 237-238). Keputusan penting dalam monarki dinasti selalu dibangun di atas konsensus di antara para anggota senior keluarga kerajaan. Sebelum membuat keputusan seperti itu, raja harus mendiskusikannya dengan anggota senior dinasti dan dia harus mendengarkan semua masukan yang ada (K. Selvik and S. Stenslie 2011, 163).

Otoritas keluarga kerajaan diperoleh dari dekrit kerajaan yang dikeluarkan Raja Abdullah bin Abdulaziz pada tahun 2006. Ia mengumumkan pembentukan *the Allegiance Institution*. Badan terdiri tiga puluh anggota keluarga kerajaan, masing-masing mewakili cabang dari putra Raja Abdulaziz bin Abdurrahman. pasal 11 dan 12 dalam *the Allegiance Institution* menetapkan bahwa anggota Lembaga memiliki otoritas penuh untuk mencalonkan dan memilih Pangeran Mahkota, Raja berikutnya Arab Saudi . Selain itu, pada pasal 15 *the Allegiance Institution* memiliki kekuatan untuk menggantikan Raja dan / atau Pangeran Mahkota jika menemukan bahwa mereka secara permanen tidak mampu memimpin kerajaan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (Henderson 2009 , 30-33).

Dengan sistem monarki yang seperti ini maka, pengambilan kebijakan luar negeri Arab Saudi dipengaruhi oleh lingkaran dalam keluarga kerajaan. Seperti yang dikatan oleh Nizar Bin Obaid Madani, *Saudi Minister of State for Foreign :*

The King always consults with the Crown Prince, the deputy Crown Prince and other senior members of the royal family when performing internal and external policies. The King also consults various bodies before making decision. The Ministry of the foreign affairs, Defence Ministry, Ministry of internal affairs, the National Security Council the Saudi Intelligence and Majlis Ash Shura (the Saudi Parliament) all play an important role in providing the King and his deputies with the necessary studies, advice and suggestions. In addition, the King has a privet consultants, wither they are religious scholars, economists, politicians, militaries and other experts. Saudi Arabia has a unique system which allow the government to study and analyzes all suggestions, views and advise, and when the government make its decision, the whole country work together as one unite to achieve its goals. (Madani 2009).

Dari pernyataan Madani diatas maka dapat kita lihat bahwa dalam membuat kebijakan luar negeri Arab Saudi, raja bukan merupakan aktor tunggal. Keluarga kerajaan merupakan aktor dominan yang mempengaruhi raja dalam mengambil keputusan. Dengan adanya sistem yang seperti ini maka kebijakan luar negeri Arab Saudi diharapkan tidak membahayakan nama baik keluarga kerajaan.

Sistem seperti ini juga berlaku dalam kasus pemutusan hubungan diolomatik Arab Saudi terhadap Iran pada tahun 2016. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam pengambilan kebijakannya Raja Arab Saudi selalu bermusyawarah dengan keluarga kerajaan. Sehingga keputusan yang dibuat mendapat dukungan dari keluarga kerajaan. Dukungan dari keluarga kerajaan diperoleh dari ketidaksukaan mereka terhadap Iran.

The kingdom's chief cleric, Grand Mufti Sheikh Abdul-Aziz Al Sheikh menyatakan ketidaksukaannya terhadap Iran pada tanggal 6 September 2016 saat diwawancara oleh Mecca Newspaper. Ia menyatakan,

"We must understand these are not Muslims, they are the son of the Magi and their hostility towards Muslims is an old one, especially with the People of the Tradition [Sunnis]." Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, menyebut para pemimpin Iran "bukan Muslim" karena Iran merupakan keturunan Majusi. Sebutan Majusi mengacu pada Zoroaster dan orang-orang yang menyembah api. Penganut Majusi diyakini sudah ada lebih dulu dari Kristen dan Islam (BBC News 2016).

Kemudian salah satu pejabat senior Saudi dan juga gubernur Mekah Pangeran Khaled al-Faisal mengatakan bahwa Iran adalah pembohong dan pemfitnah karena menyerukan perubahan dalam administrasi haji (Riedel 2016). Pernyataan tersebut disampaikan Pangeran Khaled al-Faisal ada konferensi pers pada tanggal 14 September 2016 di Mina. Pada pertemuan ini Ia juga menyatakan, *"I pray to God Almighty to guide them and to deter them from their transgression and their wrong attitude toward their fellow Muslims among the Arabs in Iraq, Syria, and Yemen."* Pangeran Khaled menyatakan ketidaksukaannya dengan Iran karena perilaku mereka yang salah terhadap sesama muslim di Irak, Suriah dan Yaman (Asharq Al-Awsat 2016).

Putra mahkota Pangeran Mohammad bin Nayef dan Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman merupakan pendukung tindakan keras yang diberikan kepada Iran (Riedel 2016). Pada sidang Umum PBB di Manhattan tanggal 19 September 2016, Putra Mahkota mengatakan :

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia calls upon the

Islamic Republic of Iran to desist from all of the policies of discrimination, racism and sectarianism and to begin to build positive relations with its neighbors on the basis of the principles of good-neighborliness and non-interference in the internal affairs of other States. (Al-Arabiya English 2016)

Ketidaksukaan anggota kerajaan terhadap Iran disebabkan juga karena semangat revolusi yang disebarkan oleh Iran. Semangat revolusi ini mempengaruhi penduduk minoritas syiah yang ada di Arab Saudi. Semangat revolusi Iran memunculkan gerakan aktivis serta demonstrasi di Provinsi Selatan Arab Saudi dimana mayoritas penduduknya adalah penganut syiah. Minoritas Syiah didaerah tersebut berkali-kali melakukan demonstrasi yang meyarakan diskriminasi yang dialami oleh kaum minoritas syiah di Arab Saudi (Press TV 2011).

Serangkain demonstrasi terjadi dari tahun 2011 sampai dengan 2012 di beberapa kota di Arab Saudi yaitu, Qatif, Hafuf, al-Awamiyah dan Riyadh. Para demonstran meneriakkan slogan yang menyatakan Pangeran Nayef adalah kriminal, terorist dan pembunuh. Para demonstran juga meneriakkan slogan runtuhnya kekuasaan keluarga Saud. Mereka memprotes tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kerajaan terhadap minoritas syiah di Arab Saudi. Gerakan anti pemerintah ini menyerukan agar terjadinya perubahan bentuk pemerintahan di Arab Saudi. Gerakan yang dipengaruhi oleh semangat revolusi Iran ini merupakan ancaman bagi monarki di Arab Saudi. Sehingga menambah ketidak sukaan keluarga kerajaan terhadap Iran (Hill 2012).

Ketidaksukaan anggota kerajaan terhadap Iran memberikan dukungan kepada Raja dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada tanggal 3 Januari 2016. Keputusan ini tentu saja bukan merupakan kemauan pribadi Raja Salman, namun keputusan ini merupakan pertimbangan matang yang telah dimusyawahkan dengan keluarga kerajaan dan memperoleh dukungan sehingga Raja mengambil kebijakan tersebut.

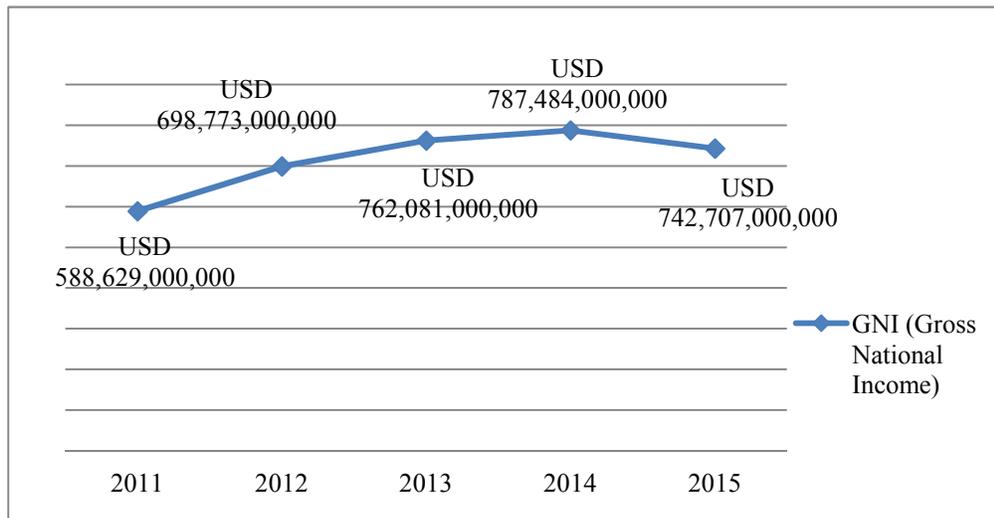
B. Kondisi Ekonomi dan Militer Arab Saudi

Dalam upaya melihat proses pengambilan kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Iran, kondisi ekonomi dalam negeri Arab Saudi berpengaruh dalam proses tersebut. Menurut William D. Coplin, demi mengetahui kondisi ekonomi negara dilakukan dengan menakar kemakmuran negara, kemampuan kemakmuran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pola-pola pertumbuhan ekonominya, mengetahui jumlah absolut barang dan jasa yang diproduksi, jumlah relatif, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur hal-hal tersebut dapat dilihat melalui konsep GDP (*Gross Domestic Product*), GNP (*Gross National Product*) ataupun GNI (*Gross National Income*) yang telah dikembangkan ekonom. Dalam penelitian ini penjelasan mengenai kondisi ekonomi Arab Saudi akan dilihat melalui GNI nya, dikarenakan World Bank mengubah penakaran kondisi ekonomi negara dari GNP ke GNI.

Maka dari itu, untuk mengetahui kondisi ekonomi Arab Saudi dapat dilihat dari tingkat GNI dan GNI per kapita. Berdasarkan data dari World Bank, besar GNI Arab Saudi dari tahun 2011-2015, ialah sebagai berikut :

Grafik4.1

GNI (Gross National Income) Arab Saudi



Sumber : diolah dari *World Bank*

Dari data World Bank di atas, dapat dilihat bahwa Arab Saudi memiliki jumlah pendapatan yang besar selama 2011-2015. Dari data tersebut juga, pada 2015 GNI Arab Saudi mencapai USD 742.707 juta. Besar GNI tersebut menempatkan Arab Saudi di 20 besar negara dengan GNI terbesar dunia. Arab Saudi menempati peringkat ke-19 di bawah Indonesia, Belanda dan Turki. Besaran GNI tersebut juga merupakan yang terbesar di antara negara-negara Teluk dan Timur Tengah. Berikut daftar 20 besar negara dengan GNI terbesar di dunia tahun 2015:

Tabel 4.2

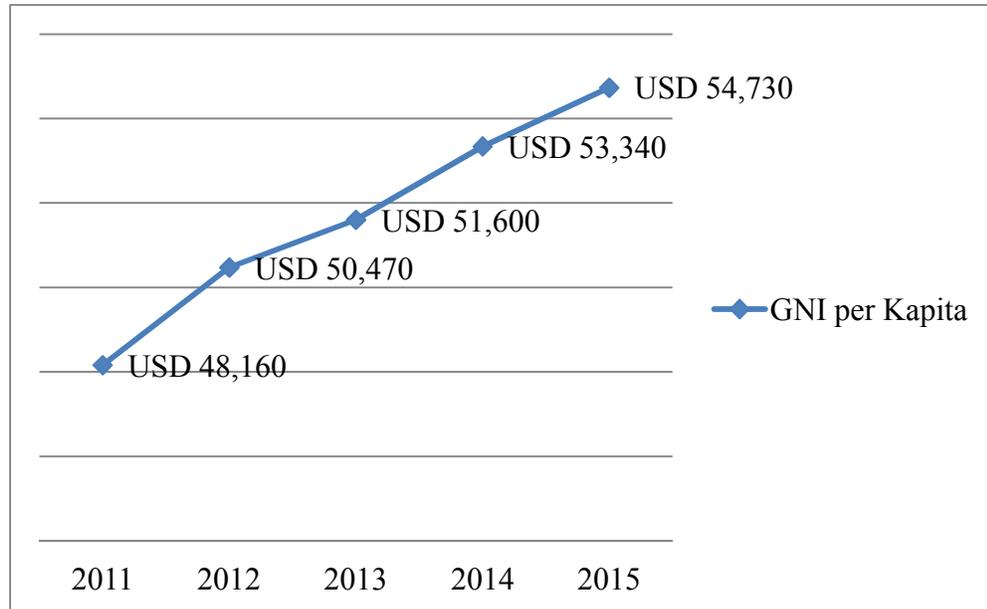
Daftar Gross National Income 2015

Ranking	Economy	(millions of US
1	United States	17,663,587
2	China	10,723,960
3	Japan	4,656,384
4	Germany	3,727,756
5	United Kingdom	2,823,301
6	France	2,711,408
7	India	2,084,448
8	Brazil	2,047,110
9	Italy	1,993,904
10	Canada	1,702,895
11	Russian Federation	1,668,650
12	Australia	1,428,650
13	Korea, Rep.	1,388,988
14	Spain	1,324,057
15	Mexico	1,233,658
16	Indonesia	887,028
17	Netherlands	828,796
18	Turkey	782,998
19	Saudi Arabia	742,707
20	Switzerland	697,627

Sumber : diolah dari *World Bank*

Kemudian dari data mengenai GNI pula, dapat dilihat besaran GNI per kapita Arab Saudi. Berikut data mengenai GNI per kapita dari World Bank:

Grafik 4.2
GNI per Kapita Arab Saudi



Sumber : diolah dari *World Bank*

Berdasarkan Data mengenai GNI di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2015 GNI perkapita di Arab Saudi terus meningkat dengan GNI perkapita tertinggi sebesar USD 54.730 pada 2015. Sehingga menjadikan Arab Saudi sebagai *High Income Economy Country*. Sebuah negara dapat diklasifikasikan sebagai *High Income Economy Country* apabila GNI per kapita nya lebih dari USD 12.475 per tahun. Dilihat dari GNI per kapita Arab saudi dari 2011-2015, Arab saudi tidak pernah berada di bawah level *High Income Economy Country*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Arab Saudi dapat dikatakan kuat.

Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran tentulah sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi Arab Saudi. Selain kondisi perekonomian yang kuat, hubungan kerjasama perdagangan Arab Saudi dan Iran kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi kedua negara. Bahkan pertemuan ekonomi terakhir yang pernah terjadi diantar kedua negara ialah pada tahun 2005. Nilai ekspor dari Iran ke Saudi sebesar 158 juta dollar Amerika dan nilai Impor dari Saudi ke Iran sebesar 45 juta dollar pada akhir periode 20 Maret 2016. Terdapat penurunan nilai ekspor dan impor kedua negara pada akhir periode 21 november 2015. Nilai ekspor dari Saudi ke Iran sebesar 132 juta dollar Amerika dan nilai impor dari Saudi ke Iran sebesar 132,2 juta dollar Amerika (Financial Tribune 2016). Data dari *Trading Economics* menyatakan Nilai ekspor dan impor antar Arab Saudi dan Iran terbilang kecil dibandingkan dengan nilai ekspor rata-rata Arab Saudi dari tahun 1968-2016 adalah 97373,18 juta dollar Amerika dan nilai impor rata-rata Arab Saudi dari tahun 1968-2016 adalah 224912,45 juta dollar Amerika. Jadi pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran tidak akan memperburuk perekonomian Arab Saudi.

Kemudian kondisi militer Arab Saudi juga berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Iran. menurut William D. Coplin ada tiga kriteria yang paling penting dalam menentukan kekuatan militer suatu negara yaitu, jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan perlengkapan militernya. Maka dari itu untuk mengetahui kondisi militer Arab

Saudi dapat dilihat dari jumlah pasukan , tingkat pelatihan serta perlengkapan yang dimilikinya.

Data dari *Global Fire Power* pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki 15.300.000 personil yang tersedia. Jumlah personel aktif yang bertugas mencapai 235.000 personel. Pada 2015 angkatan bersenjata Arab Saudi memiliki personil sebagai berikut: tentara berjumlah 75.000 personel ; angkatan udara berjumlah 20.000 personel; pertahanan udara berjumlah 16.000 personel ; dan angkatan laut berjumlah 15.500 (termasuk 3.000 marinir) personel , pasukan rudal stratgic berjumlah 2500 personel. Selain itu, Saudi Arabian National Guard memiliki 100.000 tentara aktif dan 25.000 pasukan paramiliter (Global Security 2016).

Akademi Militer Raja Abd al Aziz adalah sumber utama dari letnan kedua untuk tentara di Arab Saudi. Diperlukan waktu tiga tahun untuk memperoleh gelar sarjana ilmu militer dan komisi. Setelah lulus letnan kedua baru masuk sekolah cabang untuk spesialisasi di infanteri, artileri, armor, persenjataan, unit udara, insinyur, komunikasi, polisi militer, atau administrasi. Kemudian petugas di pertengahan karir bersaing untuk mendapatkan tempat di Sekolah Staf dan Komando di Riyadh untuk memperoleh gelar master ilmu militer, langkah yang diperlukan menuju promosi ke jajaran senior. Petugas yang terpilih dapat melanjutkan keperguruan tinggi militer yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Arab Saudi

mementingkan kualitas dari tentara yang dihasilkan. Jadi tentara Arab Saudi bukanlah tentara asal jadi saja, namun mereka mengikuti pelatihan yang lama untuk bisa menjadi tentara negara (Global Security 2016).

Untuk pelatihan penerbangan angkatan udara berlangsung *di King Faisal Air Academy* di Al Kharj. Pelatihan penerbangan terdiri dari kursus dua puluh tujuh bulan. *British Aerospace* merupakan instruktur yang disediakan oleh Arab Saudi untuk melatih angkatan udaranya. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan utama, pasukan Angkatan udara ditugaskan selama beberapa bulan pelatihan lanjutan dari *British Strikemasters* dan *Hawks*, yang memiliki peralatan yang canggih. Sejumlah fasilitas angkatan laut dan teknis pelatihan dibangun dengan bimbingan Amerika Serikat. Untuk memperoleh kualitas yang baik dalam pelatihan tentaranya, Arab Saudi bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan negara yang maju dalam bidang militer (Global Security 2016).

Setelah mengetahui jumlah pasukan serta pelatihan yang dimiliki oleh Arab Saudi, selanjutnya penting diketahui perlengkapan militer yang dimilikinya. Berdasarkan data dari *Global Fire Power* pada tahun 2015 jumlah perlengkapan militer Arab Saudi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Jumlah Perlengkapan Militer Arab Saudi tahun 2015

Sumber : diolah dari *Globa Fire Power*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Arab Saudi memiliki 772 unit pesawat

	Units	Scale	2015
Available Manpower	Persons	Units	15,300,000
Fit for Service	Persons	Units	14,000,000
Active Frontline Personnel	Persons	Units	235,000
Active Reserve Personnel	Persons	Units	25,000
Tanks (MBT / Light)	Number	Units	1,210
Armored Fighting Vehicles (AFVs)	Number	Units	5,472
Self-Propelled Guns (SPGs)	Number	Units	524
Towed Artillery Pieces	Number	Units	432
Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs)	Number	Units	322
Total Aircraft	Number	Units	722
Fighters/Interceptors	Number	Units	245
Fixed-Wing Attack Aircraft	Number	Units	245
Transport Aircraft	Number	Units	221
Trainer Aircraft	Number	Units	213
Helicopters	Number	Units	204
Attack Helicopters	Number	Units	22
Total Naval Strength	Number	Units	55
Frigates	Number	Units	7
Corvettes	Number	Units	4
Coastal Defense Craft	Number	Units	39
Mine Warfare	Number	Units	3

tersebut menunjukkan kekuatan militer udara yang cukup kuat di regional.

Maka tidak berlebihan bila Arab Saudi dapat dinilai sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat. Argumen ini juga diperkuat dengan artikel dari *Bussines Insider* yang menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar ke-3 di wilayah Timur Tengah. Sedangkan di dunia Arab Saudi berada pada urutan ke-27 sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar. Peringkat tersebut dipertimbangkan melalui aspek pendanaan

yang disediakan untuk militer dan pertahanan, keterbaruan persenjataan, dan aspek lainnya. Arab Saudi menyediakan 87,2 juta dollar Amerika untuk pengeluaran militernya, yang kemudian menjadikannya sebagai negara ke-3 di dunia dalam hal besar pedanaan militer yang disediakan.

Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran tentu saja mempertimbangkan kondisi militer Arab Saudi. Data dari *Bussines Insider* menyatakan bahwa Arab Saudi memiliki kekuatan militer terbesar ketiga di Timur Tengah Sedangkan Iran di nomer lima. Hal ini membuktikan Arab Saudi memiliki militer yang kuat, sehingga apabila pemutusan hubungan diplomatik ini berlanjut kepada perang diantara kedua negara maka Arab Saudi tidak akan takut melawan Iran. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan Pangeran Khaled al-Faisal kepada *Saudi Press Agency (SPA)* pada tanggal 14 september 2016 , Ia menyampaikan pesan kepada pemimpin Iran yang berisi :

if they are preparing an army to invade us, we are not easily taken by someone who would make war on us. When we desire, and with the help of God Almighty, we will deter every aggressor and will never relent in protecting this holy land and our dear country. No one can defile any part from our country if any one of us remains on the face of the earth.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Arab Saudi tidak takut apabila pemutusan hubungan diplomatik ini berakhir dengan perang. Arab Saudi akan menghalangi setiap agresor yang akan menyerang negaranya (Middle East Observer 2016).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat, bahwa dalam pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi. Kecilnya nilai perdagangan antara Arab Saudi dan Iran, serta kuatnya militer Arab Saudi dibanding Iran membuat mereka tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran.

C. Konteks Internasional

Dalam era yang semakin terikat seiring dengan perkembangan globalisasi, hubungan antar-negara pun semakin mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh sebuah negara, maka dari itu, pembahasan mengenai pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran tidak terlepas dari pengaruh konteks internasionalnya. Jadi hal yang terjadi dinegara lain dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.

Pada Sabtu malam tanggal 2 Januari 2016 Kedutaan Arab Saudi di Tehran dibobol dan dibakar pengunjuk rasa. Sebelum melakukan pembobolan, pengunjuk rasa melakukan protes atas eksekusi mati Nimr al-Nimr oleh kerajaan Arab Saudi (Aljazeera 2016). Karena aksi tersebut maka Arab Saudi mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran pada 3 Januari 2016.

Nimr al-Nimr adalah seorang Syeik Syiah al-Awamiyah warga negara Arab, yang lahir pada tahun 1960 di wilayah *Qatif* provinsi selatan Saudi yang mayoritas penduduknya menganut paham Syiah. Pada tahun 1979 Nimr pindah ke Iran untuk belajar di seminari Syiah sebelum ia melanjutkan pendidikannya di Suriah. Ia kembali ke Arab Saudi pada tahun 1994 dan mulai menyuarakan diskriminasi yang dialami oleh minoritas syiah di Arab Saudi (The Guardian 2016).

Nimr Al-Nimr menuntut Kerajaan Arab Saudi untuk melepaskan Provinsi Timur agar bisa bergabung dengan mayoritas syiah di Bahrain. Karena permintaanya ini Nimr Baqir al-Nimr yang telah beberapa kali ditangkap dan terakhir ditangkap tahun 2012, ditembak pahanya sebanyak empat kali. Pada tanggal 15 Oktober 2014 Nimr Baqir al-Nimr dijatuhi hukuman mati.

Karena kegigihannya membela minoritas Syiah, Nimr menjadi populer tidak hanya dikalangan Syiah Arab Saudi namun juga di Irak, Bahrain serta Iran (Drewett 2016). Pengaruhnya tidak hanya mencapai kaum muda namun juga sampai pejabat tinggi di Iran. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan Arab Saudi kepada Nimr menui protes dari berbagai kalangan. *Tasnim News Agency* melaporkan pada tanggal 13 Mei 2015 *Society of Seminary Teachers of Qom* mendesak Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali vonis terhadap Nimr. Mereka mengatakan Arab Saudi akan

mendapatkan konsekuensi yang fatal apabila tetap mengeksekusi Nimr (The Iran Project 2015).

Kemudian ulama senior Syiah Iran Ayatollah Makarem Shirazi mengutuk vonis yang dijatuhkan Arab Saudi ke Iran dan menyatakan bahwa muslim moderat di dunia tidak akan tinggal diam terhadap masalah ini. Ulama Syiah Iran lainnya seperti Noori Hamedani dan Ayatollah Sobhani menyatakan bahwa vonis terhadap Nimr merupakan indikator kurangnya kebebasan berekspresi di Arab Saudi dan tidak dihormatinya Hak minoritas Syiah di Arab Saudi (The Iran Project 2015).

Pada tanggal 13 Mei 2015 ini mahasiswa seminari syiah di Iran melakukan demonstrasi dan aksi duduk bersama di tengah kota Qom untuk memprotes vonis yang dijatuhkan Arab Saudi kepada Nimr. Demonstrasi besar-besaran ini diselenggarakan oleh mahasiswa dan ulama *Feyziyeh school*. Demonstrasi ini dihadiri oleh para sarjana dan ulama di Qom, mereka berkumpul sebagai tanda solidaritas terhadap Nimr yang sedang dipenjara di Arab Saudi (Tasnim News 2015). Protes serupa juga diadakan di kota Mashhad di timur laut Iran (Press Tv 2015).

Para ulama yang hadir dalam aksi duduk bersama di Qom ini menyatakan bahwa Arab Saudi akan membayar harga yang berat jika mengeksekusi Nimr. Mereka memperingatkan eksekusi tersebut bisa memicu "gempa bumi" yang akan menyebabkan kejatuhan dinasti Al Saud. Ulama

senior syiah Seyyed Mohammad Saeedi mengutuk vonis yang dijatuhkan dengan menyatakan, *“if Sheikh Nemr is executed, the Shia people in east of Saudi Arabia will rise against the regime and would “set the entire Saudi kingdom ablaze.”* (Press Tv 2015)

Protes terhadap vonis hukuman mati bagi Nimr tetap berlangsung sampai dengan hari sebelum eksekusi tersebut dijalankan. *Mehr news agency* melaporkan pada tanggal 1 Januari 2016 Ayatollah Ahmad Khatami, *an Iranian member of the Assembly of Experts* dan pemimpin shalat jum'at yang dalam khutbah nya menyatakan :

I have no doubt that this pure blood will stain the collar of the House of Saud and wipe them from the pages of history. The crime of executing Sheikh Nimr is part of a criminal pattern by this treacherous family ... the Islamic world is expected to cry out and denounce this infamous regime as much as it can. (Reuters 2016)

Ayatollah Ahmad Khatami percaya jika eksekusi terhadap Nimr tetap dilaksanakan maka akan ada pertumpahan darah didalam dinasti Saud. Ia percaya eksekusi mati Nirm merupakan tindakan kriminal yang akan dilakukan oleh keluarga kerajaan Arab Saudi.

Walaupun vonis tersebut menuai protes dari banyak pihak, namun Arab Saudi tetap menjalankan eksekusi mati Nimr pada tanggal 2 Januari 2016. Setelah eksekusi tersebut terjadi, juru bicara dari kementerian luar negeri Iran Hossein Jaber Ansari mengeluarkan pernyataan resmi yang dikutip oleh *IRNA news agany* menyatakan, *"The Saudi government supports terrorist movements and extremists, but confronts domestic critics with*

oppression and execution... the Saudi government will pay a high price for following these policies." Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Iran tidak menyetujui eksekusi mati Nimr yang dianggap sebagai benstuk opresi terhadap minoritas syiah di Arab Saudi (Sinclair 2016).

Ulama besar syiah di Iran juga mengutuk hukuman mati terhadap Nirm. Ulama senior Ayatollah Nasser Makarem Shirazi melabeli tindakan Arab Saudi sebagai tindakan “kejahatan keji”, dan umat Muslim akan melakukan “balas dendam” atas kematian Nimr. Dalam pernyataan yang berbeda, Ulama besar syiah Ayatollah Lotfollah Safi Golpaygani menyatakan bahwa eksekusi mati Nimr akan membangunkan dunia Islam dan mengukir jalan kehancuran rezim Saudi (Tasnim News Agency 2016).

Pada siang hari tanggal 2 januari 2016, sekolah teologi negeri Iran diliburkan untuk melakukan protes atas eksekusi Nirm. Jelang beberapa jam, media di Iran melaporkan mahasiswa dari seminari Tehran mulai (Startfor 2016). Aksi protes ini juga diikuti oleh mahasiswa milisi Basij yang terhubung dengan *Iran's elite Revolutionary Guards* (Saudi Gazzate 2016). Demonstrasi ini diikuti oleh laki-laki di akhir usia belasan dan awal 20an yang bersemangat untuk membuktikan kebenaran mereka.

Aksi protes ini berubah menjadi rusuh ketika peserta demo mulai melempar bom api ke gedung kedutaan besar Arab Saudi dan menerobos masuk kedalam gedung kedutaan. *Iranian Students' News Agency* melaporkan

para demonstran meneriakkan slogan “Death to the Al Saud family” dan membakar photo para petinggi kerajaan Saudi sebelum mereka menerobos masuk kedalam gedung kedutaan (Hubbardjan 2016).

Pada dini hari tanggal 3 Januari 2016, para demonstran yang berhasil masuk ke gedung kedutaan. Mereka menghancurkan Bendera Arab Saudi serta menghancurkan funitur yang ada di dalam gedung kedutaan. Mereka juga memecahkan kaca serta menyalakan api didalam gedung yang mengakibatkan kebakaran terjadi. Para demonstran juga mengambil dokumen dan melemparkannya dari atap gedung kedutaan (Hubbardjan 2016).

Polisi baru turun tangan ketika para demonstrasi melakukan penjaran. Pemerintah tidak menyuruh para demonstrasi untuk tenang sampai peristiwa ini mencapai klimaks dan gedung kedutaan terbakar. Polisi menahan 40 orang dari estimasi 1000 orang yang mengikuti demo (Startfor 2016). Setelah polisi berhasil menghentikan kerusuhan tersebut, barulah Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan statmen agar para demonstran menghormati gedung kedutaan (Saudi Gazzate 2016).

Seperti yang tertera pada [Vienna Convention on Diplomatic Relations](#), yang ditandatangani Iran, Negara tuan ruman merupakan penanggung jawab utama untuk menjaga keamanan pos diplomatik asing yang berada didalam negaranya. Jika negara tuan ruman gagal atau tidak ingin menyediakan keamanan bagi pos diplomatik asing maka penyerangan dapat

terjadi dengan mudahnya. Dalam peristiwa penyerangan gedung kedutaan Arab Saudi , pemerintah Iran gagal memberika perlindungan terhadap pos diplomatik yang berada di wilayahnya (Saudi Gazzate 2016).

Seperti yang telah dijelaskan , kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di luar negaranya. Gagalnya pemerintah iran melindungi kedutaan Arab Saudi Dalam peristiwa penyerangan pada tanggal 3 januari 2016 telah mempengaruhi Arab Saudi untuk mengambil kebijakan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Pada bab IV ini dijelaskan konsideran-konsideran dalam pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran. konsideran pertama adalah politik dalam negeri Arab Saudi. Dimana keluarga kerajaan yang memiliki pengarus yang kuat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, memberikan dukungannya dalam pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran. Konsideran ke dua adalah kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi. Kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang kuat membuat pengambil kebijakan Arab Saudi tidak ragu-ragu dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Konsideran yang terakhir adalah konteks Internasional. Kegagalan Iran dalam melindungi misi diplomatik Arab Saudi membuat Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Ketiga konsideran ini mempengaruhi pengambil kebijakan Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran.